

**RELASI AKTOR DALAM KETERKAITAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
PADA SEKTOR PERTANIAN**

**WAHYUDI
P023202001**



**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGAJUAN
RELASI AKTOR DALAM KETERKAITAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
PADA SEKTOR PERTANIAN

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor

Program Studi Pembangunan

Disusun dan diajukan oleh

WAHYUDI
P023202001

kepada

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

DISERTASI
RELASI AKTOR DALAM KETERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN DAERAH PADA SEKTOR PERTANIAN

WAHYUDI
P023202001

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Doktor Studi Pembangunan
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin
pada tanggal 9 Oktober 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor

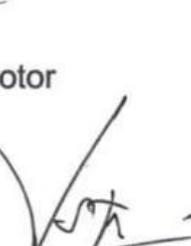


Prof. Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, M.TDev., MH

Nip. 196612311994121003

Ko-Promotor

Ko-Promotor



Dr. Sultan Sahab, SE., M.Si
Nip 19691215199903 1 002



Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS
Nip 196306061988031004

Ketua Program Studi,

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc **Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M. MedEd**
Nip 195311271980031006 **Nip 196612311995031009**



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, disertasi berjudul “Relasi Aktor Dalam Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Pada Sektor Pertanian” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, M.TDev., MH (Promotor), Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS (co-promotor-1), Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si (co-promotor-2). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari disertasi ini. Sebagian dari isi disertasi ini telah dipublikasikan di: (1) Jurnal Sustainability MDPI volume 14, 16297. DOI: 10.3390/su142316297 sebagai artikel dengan judul “Consistency of Central and Regional Planning in the Agricultural Sectors and the Factors Affecting It in Indonesia”; (2) Journal of Advanced Zoology (Topic Agricultural and Biological Science) dengan judul “The Power Relation Among Actors within National and Local Agricultural Sector Planning in Indonesia”, dan (3) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Volume. 1012 012074 DOI: 10.1088/1755-1315/1012/1/012074 dengan judul “Impact of the Covid-19 Pandemic on Rice Farming Planning in Indramayu District, West Java”.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2023



Wahyudi
NIM P023202001

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya bersyukur bahwa disertasi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan disertasi ini dapat terselesaikan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, M.TDev., MH sebagai promotor, Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS sebagai ko-promotor-1, dan Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si sebagai ko-promotor-2. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada penguji eksternal, Prof. Dr. Benny Rachman, MS, Ketua Program Studi Pembangunan Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc, para penguji diantaranya: Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS; Prof. Dr. Nursini, SE., MA; Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D atas bimbingan, masukan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini.

Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Kementerian Pertanian yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian di lapangan, dan kepada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, dan Lampung Selatan atas fasilitasi selama penelitian berlangsung.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan Program Studi Pembangunan yang telah memfasilitasi saya menempuh program doktor serta para dosen dan rekan-rekan Studi Pembangunan dalam tim penelitian.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan memotivasi mereka selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada isteri tercinta (Nur Laili Rahmawati, SP., ME) dan anak-anakku (Muhammad Zakwan Haidar, Azmi Nur Haniyah, Muhammad Hafidz Izzuddin) atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan di Bagian Kebijakan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian atas supportnya.

Penulis,
Wahyudi

ABSTRAK

WAHYUDI. **Relasi Aktor dalam Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah pada Sektor Pertanian** (dibimbing oleh Imam Mujahidin Fahmid, Darmawan Salman, dan Sultan Suhab).

Pola interaksi yang melibatkan multi aktor berimplikasi terhadap perencanaan nasional dan daerah yang konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi perencanaan antara nasional dengan daerah, menganalisis peran, kepentingan dan kuasa aktor, dan pengelolaan bantuan pemerintah. Penelitian dilakukan di level pusat dan daerah (Kabupaten Indramayu dan Lampung Selatan). Data dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis konsistensi, *comparative case study*, analisis stakeholder, dan analisis Resources (R)-Norms (N)-Organization (N). Kesimpulan penelitian ini adalah: tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan nasional dengan Kabupaten Indramayu mencapai 87,68% dan dengan Lampung Selatan 95,81%. Ada 5 (lima) faktor utama penyebab inkonsistensi, yaitu kebijakan kepala daerah, *force majeure*, prioritas pembangunan, distorsi komunikasi, dan dukungan partai politik; hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan cenderung menjadi arena bagi aktor yang berkontestasi. Aktor anggota dewan, bupati dan kepala dinas, serta direktur jenderal teknis berperan signifikan dalam perencanaan; masing-masing aktor dengan pengaruh dan kepentingannya membentuk relasi kuasa. Relasi kekuasaan tersebut memiliki 4 (empat pola), yaitu persuasif, konflik, kolaborasi, dan perlawanan yang masing-masing dapat dianeksasikan kedalam 4 kuasa, yaitu negara (*state authority*), kuasa local (*local authority*), kuasa Komprador (*compradors authority*), dan kuasa masyarakat petani (*civil society*). Dalam pengelolaan bantuan pemerintah, nilai budaya lokal berupa sistem ceblokan masih dipertahankan oleh petani yang mendorong R-O-N belum efektif.

Kata kunci: relasi, aktor, perencanaan, pertanian, nasional dan daerah

ABSTRACT

WAHYUDI. **The Power Relation Among Actors within National and Local Agricultural Sector Planning** (supervised by Imam Mujahidin Fahmid, Darmawan Salman, and Sultan Suhab)

Multiple actors' interaction led to a inconsistent nexus between national and local agricultural sector planning. The research is aimed to analyze the consistency of planning between the national and local agricultural planning, analyze the roles, interests, and the power of actors, as well as the management of government assistance. The research was conducted both at the national and local levels (Indramayu and South Lampung Regencies) and the data were collected through in-depth interviews. In this study, the content and consistency analysis, the comparative case studies, the stakeholder analysis, and the Resources (R)-Norms (N)-Organization (N) analysis were the methods applied. The research results also showed that planning tends to be an arena for contesting actors. The results showed that the level of consistency between national planning documents with Indramayu Regency was 87.68% and with South Lampung was 95.81%. In addition, there are 5 (five) main factors causing inconsistency, namely district head policies, force majeure, development priorities, communication distortions, and political party support; The research results also showed that planning tends to be an arena for contesting actors. Pertaining to the actors of parliament members, district heads and heads of service offices, as well as the technical director general have significantly roles in the planning; then each actor with his influence and interests forms a power relationship. The power relations have 4 (four) patterns, namely persuasion, conflict, collaboration, and resistance, each of which can be annexed into 4 powers, namely state authority, local authority, comprador authority, and civil society. Regarding with government assistance management, local cultural values in term of the "ceblokan system" are still maintained by farmers and as results R-O-N was yet ineffective.

Keywords: relation, actors, planning, agriculture, national and local

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG	xiii
BAB I PENDAHULUAN UMUM	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
BAB II ANALISIS KONSISTENSI RENCANA DAN IMPLEMENTASI ANTARA NASIONAL DENGAN DAERAH PADA SEKTOR PERTANIAN	12
2.1. Abstrak	12
2.2. Pendahuluan	12
2.3. Metode	15
2.3. Hasil dan Pembahasan	20
2.4. Kesimpulan	41
2.6. Daftar Pustaka	41
BAB III. PERAN KEPENTINGAN DAN KUASA AKTOR DALAM KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH PADA SEKTOR PERTANIAN	46
3.1. Abstrak	46
3.2. Pendahuluan	46
3.3. Metode	51
3.4. Hasil dan Pembahasan	56
3.5. Kesimpulan	76

3.6. Daftar Pustaka	77
BAB IV. PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH (<i>DELIVERY DAN RECEIVING MECHANISM</i>) DALAM KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH PADA SEKTOR PERTANIAN	83
4.1. Abstrak	83
4.2. Pendahuluan	84
4.3 Metode	90
4.4. Hasil dan Pembahasan	96
4.5. Kesimpulan	124
4.6. Daftar Pustaka	125
BAB V PEMBAHASAN UMUM	130
BAB VI KESIMPULAN UMUM	152
DAFTAR PUSTAKA	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rata-Rata Produksi Padi 5 Tahun Terakhir (2017-2021)/Juta Ton.....	6
Tabel 2 Deskripsi Informan Penelitian dalam Wawancara Mendalam.....	17
Tabel 3 Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Implementasi di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Selatan	21
Tabel 4 Rincian Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Kementerian Pertanian dengan Kabupaten Indramayu	22
Tabel 5 Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Kementerian Pertanian dengan Kabupaten Lampung Selatan	25
Tabel 6 Kegiatan yang diimplementasikan di Indramayu/Lampung Selatan dan sesuai dengan Dokumen Pusat.....	29
Tabel 7 Kegiatan yang diimplementasikan di Indramayu/Lampung Selatan namun tidak sesuai dengan Dokumen Pusat	30
Tabel 8 Kegiatan yang diimplementasikan di Indramayu/Lampung Selatan namun tidak sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	32
Tabel 9 Deskripsi Informan Penelitian dalam Wawancara Mendalam	53
Tabel 10 Peran Aktor dalam Proses Perencanaan pada Sektor Pertanian melalui Dana Aspirasi di Kabupaten Indramayu	56
Tabel 11 Peran Aktor dalam Proses Perencanaan pada Sektor Pertanian melalui Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Indramayu.....	57
Tabel 12 Kepentingan dan Kekuasaan Aktor pada Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Pusat di Kabupaten Indramayu	59
Tabel 13 Kepentingan dan Kekuasaan Aktor pada Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Aspirasi di Kabupaten Indramayu	60
Tabel 14 Derajat Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan Aktor pada Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Aspirasi di Kabupaten Indramayu.....	62
Tabel 15 Kepentingan dan Kekuasaan Aktor pada Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Tugas Pembantuan di Indramayu.....	65
Tabel 16 Derajat Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan Aktor pada Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Indramayu.....	67
Tabel 17 Kepentingan dan Kekuasaan Aktor pada Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Pusat di Kabupaten Indramayu	70
Tabel 18 Derajat Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan Aktor pada Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Pusat di Kabupaten Indramayu	71
Tabel 19 Deskripsi Informan Penelitian dalam Wawancara Mendalam	94
Tabel 20 Rasio luas lahan sawah yang dikuasai terhadap total alsintan traktor di lokasi Penelitian, Kabupaten Indramayu, 2022.....	96
Tabel 21 Kelembagaan Pengelola Bantuan Alsintan dari Dana Pusat	105
Tabel 22 Kelembagaan Pengelola Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dari Dana Aspirasi	109
Tabel 23 Kelembagaan Pengelola Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dari Dana Tugas Pembantuan.....	112
Tabel 24 Pemetaan Arena, Kapital, dan Kontestasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	144
Tabel 25 Pengaruh Pola Relasi Kuasa terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Sektor Pertanian	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Indonesia (Titik Merah adalah Wilayah Lokasi Penelitian)	16
Gambar 2 Diagram Alir Metode Pengumpulan Data	17
Gambar 3 Pendekatan Comparative case study	20
Gambar 4 Diagram Venn Konsistensi Kegiatan Pusat dengan Daerah	34
Gambar 5 Comparative case study	35
Gambar 6 Diagram Alir Pengumpulan Data	52
Gambar 7 Pemetaan Stakeholder/Aktor berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan/Pengaruh (Matriks 3X3)	55
Gambar 8 Matriks Pemetaan Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan Aktor dalam Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Aspirasi Pusat di Kabupaten Indramayu	62
Gambar 9 Matriks Pemetaan Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan Aktor dalam Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Indramayu	67
Gambar 10 Matriks Pemetaan Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan Aktor dalam Perencanaan Sektor Pertanian melalui Dana Pusat di Kabupaten Indramayu	72
Gambar 11 Hierarki Unit Kelembagaan	87
Gambar 12 Diagram Alir Pengumpulan dan Analisis Data	92
Gambar 13 Proses Pengusulan Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian	101
Gambar 14 Proses Pengusulan Bantuan Dana Aspirasi Sektor Pertanian yang Terjadi di Lapang	102
Gambar 15 Proses Pengusulan Bantuan Dana Pusat Sektor Pertanian yang Terjadi di Lapang	103
Gambar 16 Proses Pengusulan Dana Tugas Pembantuan Sektor Pertanian yang Terjadi di Lapang	104
Gambar 17 Perbandingan R-O-N Delivery System dan Receiving mechanism dari Dana Pusat	117
Gambar 18 Perbandingan R-O-N Delivery System dan Receiving mechanism dari Dana Aspirasi	119
Gambar 19 Perbandingan R-O-N Delivery System dan Receiving mechanism dari Dana Tugas Pembantuan	120
Gambar 20 Politik Relasi Aktor Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Level Makro	138
Gambar 21 Politik Relasi Aktor Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Level Messo	139
Gambar 22 Politik Relasi Aktor Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian Level Mikro	140
Gambar 23 Kuasa Antar Aktor dalam Kelembagaan Perencanaan Bantuan Pemerintah pada Sektor Pertanian	141
Gambar 24 Pemetaan Level Arena, Jenis Kapital, Aktor, dan Jenis Kontestasi dalam Perencanaan	143
Gambar 25 Cultural Lag Modernisasi Pertanian	149
Gambar 26 Proses Societal Guidance dari Ceblokan ke Modernisasi Pertanian	150

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 CURRICULUM VITAE	170
-----------------------------------	-----

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

Istilah	Arti dan Penjelasan
Alsintan	Alat dan Mesin Pertanian
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
Barantan	Badan Karantina Pertanian
BKP	Badan Ketahanan Pangan
BOP	Biaya Operasional Penyuluh
BPPSDMP	Badan Penyuluhan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pertanian
BPS	Badan Pusat Statistik
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani
GKG	Gabah Kering Giling
GKP	Gabah Kering Panen
JIDES	Jaringan Irigasi Desa
JITU	Jaringan Tersier Tingkat Usahatani
K/L	Kementerian/Lembaga
KTNA	Kontak Tani Nelayan Andalan
Korlap	Koordinator Lapangan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NAWACITA	Nawa Yang Berarti Sembilan Dan Cita Yang Berarti Harapan
NGO	Non Government Organization
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
PKH	Peternakan dan Kesehatan Hewan
Poktan	Kelompok Tani
POSLUHDES	Pos Penyuluhan Desa
PWMP	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian
PSP	Prasarana dan Sarana Pertanian
Renstra	Rencana Strategis
R-O-N	Resources-Norms-Organization
RPI2-JM	Rancangan Pembangunan Infrastruktur II Jangka Menengah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDG	Sustainable Development Goals
SYL	Syahrul Yasin Limpo
TA	Tenaga Ahli
UPJA	Unit Pelayanan Jasa Alsintan
UPTD	Unit Pelayanan Teknis Daerah

BAB I PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Pembangunan terkait dengan tiga aspek yakni perubahan (*change*), pertumbuhan (*growth*) dan peningkatan/improvement (Christenson & Robinson, 1992). Sebagai perubahan, pembangunan adalah perubahan yang direncanakan baik arah maupun kecepatannya, yang pada negara berkembang seperti Indonesia dipahami sebagai perencanaan (Salman, 2021). Perencanaan akan berhadapan dengan *problem* mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Oleh karena itu, perencanaan pada dasarnya merupakan sebuah komponen yang menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi atau tindakan dalam wilayah publik (Friedmann, 1987).

Berbagai penelitian mengenai perencanaan pembangunan telah banyak dilakukan di berbagai negara dengan berbagai tema. Penelitian terkait perencanaan pada sektor publik sebagian besar baru membahas tentang: program (Arsyad et al., 2020), depresiasi perencanaan (Drew, 2018), teknologi dan respon sosial (Adil & Ko, 2016), distorsi pasar (Zhangab et al., 2021; Steinhauer et al., 2020; Sadriev et al., 2016), distorsi komunikasi (Wei & Meng, 2021; Sims, 2016), otonomi daerah daerah (Badrudin, 2015), perencanaan dan kuasa (Abrain, 2018), dan penyebab inkonsistensi perencanaan (Osrinda & Delis, 2016); Darlina et al., 2016; Sugiarto & Mutiarin, 2017; Triyono et al., 2019).

Dari berbagai penelitian tersebut, kajian yang dilakukan oleh Wei & Meng (2021) & Sims (2016) tentang distorsi komunikasi dan otonomi daerah Badrudin (2015), dan Sugiharto & Mutiarin (2017) tentang konsistensi perencanaan daerah tampaknya cukup relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada otonomi daerah berikut distorsinya, namun tidak mampu untuk menerangkan lebih dalam terkait perencanaan nasional dan daerah. Proses penyusunan perencanaan nasional dan daerah melibatkan banyak aktor dengan beragam kepentingan didalamnya. Hal ini mendorong banyak peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai relasi yang terbentuk.

Penelitian mengenai relasi aktor terus berkembang di berbagai negara, diantaranya mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam konflik (Fahmid, 2013), kepercayaan dan aspek keadilan (Goedkoop & Devine, 2016), aktor dan perencanaan kolaboratif (Howell & Wilson, 2019), hubungan kekuasaan (Jacobs

& Baez., 2020), aktor dan kelembagaan (Mukherjee, 2020), kepentingan aktor (Teo, 2021), peran pemerintah dan masyarakat (Vasstrøm & Normann, 2019), aktor dalam kebijakan energi di Finlandia (Laura et al., 2020), peran aktor dalam perencanaan dan manajemen krisis di Swedia (Christine and Olausson, 2019), perencanaan sistem energi dan keterlibatan aktor dengan pendekatan Multi-Objective Optimization (MOO) dan Teknik Urutan Preferensi berdasarkan Kesamaan dengan Solusi Ideal/TOPSIS (Ni Wang et al., 2020), perencanaan partisipatif dan aktor (Marlene et al., 2020), inovasi pertanian dan kerjasama multi aktor (Kerneck et al., 2021), kolaborasi antar Lembaga (Carolin & Kristina, 2018; Agota et al., 2019; Mogues, T & Billings, 2019).

Relasi aktor dalam perencanaan akan sangat mempengaruhi implementasi di lapangan (Abrain, 2018). Pada tingkat lapangan atau petani, para aktor menerjemahkan proses bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara beragam dengan respon-nya masing-masing (Guo et al., 2021).

Penelitian terkait proses pemberian bantuan, penerimaan dan pengelolaan, serta respons petani juga belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan yaitu tentang pola kelembagaan dan kontestasi aktor dalam pengelolaan irigasi (Jumiati et al., 2018), respons petani terhadap perubahan iklim di Pulau Chongming China (Guo et al., 2021) menganalisis tentang respons petani terhadap perubahan iklim di Pulau Chongming China. Adaptasi dan perilaku komunitas (Yogaswara, 2011), kearifan lokal (Widiana & Wikantiyoso, 2018), dan respons pada kebijakan publik yang melibatkan banyak stakeholder didalamnya (Nugroho, 2018).

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan memperlihatkan bagaimana peran stakeholder berperan dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan di lingkup masyarakat. Penelitian oleh Jumiati et al., (2018) juga telah membahas pola kelembagaan dan kontestasi aktor pendekatan R-O-N dan analisis *stakeholder*. Namun demikian, penelitian dan beberapa teori yang berkembang tidak spesifik membahas bagaimana pengelolaan bantuan (pemberian penerimaan dan penerimaan petani) dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian dilakukan.

Berbagai teori yang menjelaskan tentang *planning* dan *actors* sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Beberapa teori besar yang umumnya sering digunakan diantaranya: (1) perencanaan oleh Blowers (1986), Friedman (1987), Li (2011), Krott (2005), Sahide & Giessen (2015); (2) teori distorsi oleh Hogwood

(1986); (3) teori aktor dan respons oleh Latour (1980), Ostrom (1990; 1994) Long (2004), Ostrom (2005), dan Scott (2008).

Blowers (1980) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan portofolio politik yang cenderung mencerminkan pola kekuasaan yang ada dalam masyarakat dimana konflik atas kebijakan perencanaan menyebabkan ketidakpastian karena dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan kontradiksi mendasar yaitu mendukung kepentingan yang paling kuat. Hal yang dilakukan untuk mengurangi beberapa konflik menurut Blowers (1980) yaitu dengan meningkatkan koordinasi, memperkuat kekuatan organisasi dan desentralisasi dalam perencanaan secara lokal. Strategi tersebut didukung oleh teori perencanaan Friedmann (1987) dalam bukunya *Planning in the Public Domain* yang mengungkapkan bahwa tujuan utama perencanaan adalah bagaimana mengaitkan pengetahuan teknis (*technical knowledge*) untuk diterjemahkan dalam *public actions*. Terdapat empat kategori dalam teori perencanaan Friedman yaitu 1) *Reformasi Sosial*, artinya negara sebagai sarana untuk aksi sosial, 2) *Analisis Kebijakan*, artinya perencanaan sebagai proses pengambilan keputusan dengan model pemerintahan *top-down*, 3) *Pembelajaran Sosial*, artinya perencanaan untuk merubah perilaku sosial dan 4) *Mobilisasi Sosial*, artinya perencanaan mengupayakan sebuah gerakan/tindakan yang tumbuh dari bawah (masyarakat).

Proses kebijakan publik di daerah tidak terlepas dari kendala dan masalah terutama distorsi-distorsi yang dirumuskan oleh Hogwood et al., (1986) diantaranya 1) Hambatan eksternal, yaitu adanya gap antara lembaga perencana kebijakan dengan lembaga teknis pelaksana kebijakan karena ketergantungan dengan pihak lain; 2) Waktu dan sumber daya, yaitu tidak semua aktor yang terlibat dalam proses kebijakan memiliki sumber daya yang sama baik SDM maupun sumber daya lainnya; 3) Kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran yang kuat, yaitu keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi menyebabkan rumusan kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat dikarenakan analisa tidak ideal; 4) Lembaga pelaksana jarang yang mandiri; 5) Jarang ada kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya; 6) Jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Proses perencanaan dalam perumusan kebijakan publik yang begitu kompleks banyak melibatkan pihak dengan banyak kepentingan, kompleksitas

proses tersebut memiliki konsekuensi terjadinya masalah dan distorsi yang dipengaruhi oleh keterlibatan aktor didalamnya. Latour (1980) mengemukakan pada teori aktor dan jaringan yang dikenal *Actor-Network Theory* (ANT) dengan konsep penting didalamnya yakni aktor sebagai hubungan yang tercipta antar satu sama lain dengan perantara yang menggambarkan sebuah jaringan. Empat pengelompokan teori ANT diantaranya 1) Momen Problematisasi, ketika suatu masalah dihadirkan oleh seorang aktor untuk menjadi perhatian dari aktor lainnya; 2) Momen Penarikan, ketika momen problematisasi berhasil parak aktor lain yang terstimulasi akan mengikuti atau justru menolak inisiasi tersebut; 3) Momen Pelibatan, saat para aktor saling mendelegasikan satu sama lain dan saling menjajaki kompetensi; 4) Momen Mobilisasi, terjadi ketika jaringan aktor telah berhasil menduduki atau memiliki eksistensi. Perlunya kontrol lembaga dapat mencegah ketimpangan antar aktor dijelaskan oleh teori kelembagaan/*Institutional Theory* oleh Ostrom (1990) dalam bukunya *Governing the Commons* yang mengasumsikan bahwa semua situasi yang berulang dibentuk oleh serangkaian aturan kelembagaan. Aturan institusional sebagai pernyataan perspektif yang melarang, mengharuskan atau mengizinkan beberapa tindakan. Pengaturan dalam kelembagaan akan mampu mendorong komunikasi di antara individu dalam menghadapi masalah distorsi.

Atmosfer perencanaan pada jangka waktu tahun 2000-2010 mulai ditandai dengan munculnya distorsi komunikasi. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya perubahan makna informasi, maksud dan ide antara komunikator dengan komunikan. Penelitian dari (Movuh & Schusser (2012) tentang "*Power, the Hidden Factor in Development Cooperation*" yang meneliti Hutan Kemasyarakatan di Kamerun mengemukakan bahwa kekuasaan sebagai probabilitas dimana satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi untuk melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun ada perlawanan, terlepas dari dasar dimana probabilitas ini berada.

Adanya kekuasaan dalam perspektif yang berpusat pada aktor dapat memaksa aktor B untuk berperilaku secara tidak sukarela yang dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan dari aktor A. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pendekatan strategi teori institusional oleh Scott (2008) tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari sosiologi organisasi. Akar teoritisnya berasal dari teori kognitif, teori kultural serta fenomenologi dan etnometodologi. Lebih lanjut Scott (2008) menjelaskan bahwa

tiga pilar dalam tatanan sebuah kelembagaan yaitu regulative, normatif dan kognitif. Pada pilar regulatif menekankan aturan dan pengaturan sanksi, pilar normatif mengandung dimensi evaluatif dan kewajiban, sedangkan pilar kognitif melibatkan konsepsi bersama dan frame yang menempatkan pada pemahaman makna. Perencanaan pada tahun 2011-2021 terbentuk relasi kekuasaan diantara para aktor yang tidak setara. Kondisi ini merupakan dampak dari politik lingkungan (*politicized environment*). Bryant & Bailey (1997) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa politik lingkungan sebagai pusat kekuasaan atau dominasi aktor negara dan swasta terhadap sumberdaya alam.

Akibat adanya kondisi tersebut, terjadi pembatasan aktor akar rumput yaitu aktor lokal. Asumsi baru muncul dari Bryant & Bailey (1997) bahwa biaya dan manfaat yang didistribusikan diantara aktor yang tidak merata menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi yang akhirnya merubah relasi kuasa diantara aktor dalam perencanaan yang dilakukan. Terdapat 5 aktor menurut perspektif Bryant & Bailey (1997) yaitu 1) Negara (*The State*), 2) Lembaga multilateral (*Multilateral Environment*), 3) Bisnis (Business), 4) NGO lingkungan (*Environmental Non-Governmental Organisations*), dan 5) Aktor akar rumput (*Grassroots Actors*). Oleh karenanya, dalam pengertian ini, perencanaan, utamanya antara nasional (pusat) dan daerah harus direspon secara adaptif-kreatif karena berkaitan dengan desentralisasi-otonomi daerah, termasuk desentralisasi yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui sejumlah regulasi yang mengikat perencanaan daerah.

Perencanaan daerah harus menjadi satu kesatuan dengan perencanaan nasional (Vinholis et al., 2021); Li, Y & Wu, F (2013); UU 23/2014), agar tercipta efisiensi dalam implementasi kebijakannya (Hu et al., 2020). Isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program/kegiatan antara nasional dan daerah harus selaras (SEB Mendagri dan MenPPN, 2016). Lebih lanjut, Salman (2021) menyebut bahwa perencana daerah harus mampu berselancar antara kebebasan berencana berdasarkan visi-misi kepala daerah. Disisi lain, perencana nasional harus memperhitungkan varian daerah dalam membuat kebijakan untuk diikuti daerah (Xia et al., 2020; Li & Wu, 2013) seperti pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dengan rencana pemerintah daerah pada sektor pertanian di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Tabel 1 Rata-Rata Produksi Padi 5 Tahun Terakhir (2017-2021)/Juta Ton

	Jatim	Jateng	Jabar	Sulsel	Sumsel	Lampung	Sumut	Aceh	Banten	Sumbar
Rata-Rata	9,88	9,82	9,22	5,20	2,72	2,45	2,06	1,74	1,60	1,42
%	17,73	17,62	16,54	9,34	4,89	4,39	3,69	3,13	2,88	2,54

Sumber: BPS, 2022

Dari 10 provinsi sentra produksi padi nasional, Jawa Barat menduduki peringkat ketiga dengan rata-rata produksi sebesar 9,22 juta ton/tahun atau 16,54% dari produksi nasional, sedangkan Lampung posisi kelima dengan produksi 2,45 juta ton/tahun atau 4,39% (BPS, 2022). Melansir data BPS, tercatat 25 kabupaten di Indonesia sebagai produsen beras tertinggi tahun 2021 dan peringkat pertama yaitu Kabupaten Indramayu, dengan luas lahan sawah 54,35% atau 110.877 ha (Ichdayati and Sari, 2018), diperoleh produksi 1.363.312 ton gabah kering giling (GKG) atau 782.132 ton beras (BPS, 2022). Dengan jumlah produksi tersebut, tidak mengherankan jika kontribusi produksi padi di kabupaten ini kepada Jawa Barat mencapai 11,95% (BPS Jabar, 2022) dan kontribusi Jabar terhadap Nasional mencapai 14,47% (BPS, 2022).

Sementara itu, untuk Kabupaten Lampung Selatan memiliki kegiatan pembangunan berorientasi pada potensi sumberdaya alam sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan (Sitorus et al., 2013). Luas lahan produksi atau lahan siap panen sampai dengan bulan Mei 2020 sebanyak 40.220 Ha dengan estimasi hasil panen sekitar 217.188 ton (BPS Lampung Selatan, 2022). Kontribusi produksi padi di kabupaten ini kepada Lampung mencapai 14,16% (BPS Lampung, 2022) dan kontribusi Lampung terhadap Nasional mencapai 11,56% (BPS, 2022). Potensi tersebut didukung adanya Rancangan Pembangunan Infrastruktur II Jangka Menengah (RPI2-JM) bahwa pengembangan pertanian dilakukan dengan peningkatan daya saing produk pertanian melalui konsep agribisnis dan agroindustri. Lampung Selatan juga ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan terminal agribisnis berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Tahun 2011-2031. Pelibatan aktor-aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh pemerintah daerah demi meksukseskan kebijakan tersebut (Fitriani, 2015).

Pengembangan pertanian melibatkan para aktor dengan kepentingan yang melekat (Suparjan & Hempri S, 2018). Aktor politik (SD) selaku Ketua Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung misalnya, karena memiliki relasi dengan Kementerian Pertanian, maka kekuatan aktor yang melekat pada jabatannya mampu mempengaruhi proses perencanaan dari Kementerian Pertanian sampai daerah pada wilayahnya. Riyadi et al (2019) mengemukakan bahwa variabel proses pembuatan kebijakan lokal (daerah), faktor politik, pola interaksi, dan peran aktor lain mempengaruhi peran dewan daerah dalam pembuatan kebijakan daerah.

Adanya *power* (kekuasaan), kontrol dan relasi aktor di Lampung Selatan merupakan kekuatan yang tidak dimiliki Indramayu. Kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan implementasi kebijakan akibat pengaruh relasi aktor di dalamnya. Dilain sisi, peran aktor pusat yaitu DPR-RI Komisi IV yang berasal dari dapil Kabupaten Indramayu aktor politik (OS) tidak begitu memiliki *power* seperti peran aktor Lampung Selatan yang menjabat langsung sebagai ketua Komisi IV DPR-RI. Khowasi (2017) menilai bahwa perbedaan kekuatan aktor politik akan mempengaruhi perencanaan, hal tersebut dikarenakan Komisi IV DPR-RI bermitra langsung dengan Kementerian Pertanian. Adanya kekuasaan (*power*) dari aktor sebagaimana yang sudah dijelaskan maka Lampung Selatan memiliki keistimewaan tersendiri dalam mempengaruhi proses dan implementasi perencanaan nasional dan daerah, dibandingkan dengan daerah lain, khususnya dengan Indramayu.

Situasi aktor politik yang berbeda-beda dengan *power* yang berlainan akan mempengaruhi pola perencanaan nasional-daerah khususnya pada daerah penelitian seperti Lampung Selatan dan Indramayu. Pada Lampung Selatan misalnya: (1) Bupati yang berasal dari partai PDIP yang berpasangan dengan wakil bupati dari kalangan profesional dan didukung oleh Ketua Komisi IV DPR RI (SD) memiliki kuasa dan *power* yang sangat kuat dalam prioritas perencanaan dan anggaran dari Kementerian Pertanian; (2) situasi politik di internal pemerintah daerah yang stabil (bupati dan ketua DPRD berasal dari partai politik yang sama) dan komunikasi antara pemerintah daerah dan Lampung Selatan dengan Kementerian Pertanian cukup baik mendorong banyak program yang dialokasikan di wilayah ini seperti Korporasi Ternak, Kawasan Agrowisata, dan Pengembangan Perkebunan Kelapa, Kakao, dan Sawit. Sedangkan di Indramayu: (1) Bupati (dari PDIP) dan wakil bupati (dari kalangan artis/Nasdem) walaupun di dukung oleh

Komisi IV DPR RI berjalan kurang harmonis sehingga berimplikasi terhadap penyusunan rencana dan anggaran dengan Kementerian Pertanian; (2) situasi politik internal yang tidak kondusif (Bupati dan Ketua DPRD berasal dari partai yang berbeda) membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik yang berimplikasi tidak di sah-kan nya perencanaan dan anggaran (APBD) Kabupaten Indramayu.

Perencanaan nasional-daerah sering dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti kompleksitas perencanaan yang meliputi tema fokus pembangunan, pelaku/aktor, dan kelembagaan Pada kasus perencanaan nasional (Kementerian Pertanian) dengan Kabupaten Indramayu dan Lampung Selatan misalnya: (1) dalam keinterkoneksi antara rencana nasional dan daerah, Renstra Kementerian Pertanian era SYL (2019-2024) ternyata diterjemahkan beragam oleh aparatur daerah di Kabupaten Indramayu utamanya pada era Bupati NA (2021-sekarang) dan Bupati Lampung Selatan era NE (2021-sekarang). Keinterkoneksi tersebut dapat dilihat dari dokumen perencanaan antara nasional dan daerah. Dimana pemangku kepentingan sebagai kelompok ataupun individu dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu dalam perencanaan. Pemangku kepentingan akan memiliki kekuasaan masing-masing sesuai dengan posisi yang dimiliki (Jumiati et al., 2018). Hal ini membuat perencanaan terdistorsi baik dari rencana ke rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan rencana ke implementasi di lapangan; (2) Perubahan Renstra yang terjadi pada era SYL berimplikasi terhadap perencanaan daerah di Kabupaten Indramayu. Relasi aktor yang terlibat dalam perubahan rencana nasional dan daerah pada sektor pertanian membuat perencanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya; (3) pada tingkat petani, pengelolaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui dana aspirasi, dana pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan direspon secara beragam oleh petani. Niat dari rencana yang dituangkan dalam perencanaan tidak serta merta dapat diimplementasikan di tingkat lapangan (Li, 2010). Artinya, respon yang berbeda dari pemberi bantuan terhadap penerimaan sumberdaya yang diberikan oleh perencana dalam kaitan niat mensejahterakan petani membuat perencanaan tidak berjalan sesuai kehendak yang diinginkan oleh para aktor kunci.

Dengan banyaknya penelitian yang sudah dilakukan dengan teori pendukungnya, telah cukup memberikan gambaran kepada peneliti untuk menerjemahkan pengetahuan yang secara umum berkembang dan menjawab fenomena yang terjadi di lapangan. Namun demikian, beberapa diskursus terkait

konsistensi, aktor, pengelolaan bantuan (*delivery dan receiving mechanism*), serta politik relasi aktor dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian belum dikaji secara mendalam dan utuh. Oleh karena itu, penelitian mengenai relasi aktor dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Lampung Selatan ini perlu dilakukan untuk mengisi gap/kekosongan khasanah keilmuan.

Penelitian mengenai relasi aktor pada sektor pertanian memang sudah dilakukan oleh Kernecker Maria et al., (2021), namun fokus pada inovasi pertanian dengan teknologi digitalisasi di wilayah Eropa, sedangkan penelitian mengenai dinamika relasi aktor dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah belum pernah dilakukan. Aspek ini sangat urgen diteliti karena perencanaan nasional dan daerah pada dasarnya merupakan sebuah kesatuan. Kontribusi penelitian ini dalam studi pembangunan adalah perhatiannya pada relasi kuasa dari aktor-aktor yang berinteraksi dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah tersebut, dengan fokus pada sektor pertanian.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam dan utuh, peneliti membagi penelitian kedalam beberapa sub bab yang dimulai dari pendahuluan umum; rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian; pembahasan 3 topik mengenai perencanaan, relasi aktor, pengelolaan bantuan (*delivery and receiving mechanism*), pembahasan umum, kesimpulan, dan pustaka.

1.2 Rumusan Permasalahan

Ada beberapa permasalahan penting yang terjadi dalam kaitannya perencanaan nasional dan daerah dan sektor pertanian. Pertama, perencanaan saat ini masih dihadapkan pada kompleksitas perencanaan, terdiri dari: 1) kompleksitas tema perencanaan yang semakin beragam (baik pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, sustainability, dan inklusivitas) yang semuanya dituntut untuk diwujudkan pada satu sisi yang lain justru terjadi tradeoff antara satu dengan lainnya; 2) kompleksitas pelaku perencanaan, baik sektor publik, swasta, masyarakat, NGO dalam dan luar negeri, 3) kompleksitas lembaga seperti pemerintah (pusat dan daerah) dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan OPD nya, dan legislatif. Harusnya perencanaan tetap *on the track/in line*, disusun top-down dan bottom up dari Bappenas-K/L-Provinsi-Kab-Kec-Desa-Kelompok dan sebaliknya. Namun demikian, adanya kebijakan, aktor dan kelembagaan dengan berbagai kepentingannya membuat perencanaan kurang konsisten. Implikasinya para

perubahan renstra kementerian dan renstra perangkat daerah yang membidangi pertanian. Kedua, proses penyusunan perencanaan (misalnya kasus pemberian bantuan pemerintah (alat dan mesin pertanian) banyak melibatkan aktor mulai dari komisi IV hingga petani, tentu melalui proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif. Pembahasan perencanaan dilakukan oleh aktor-aktor sesuai kewenangannya, banyaknya aktor yang terlibat dalam proses perencanaan diluar kewenangannya menghambat pencapaian target dan sasaran. Implikasinya, Tidak tercapainya rencana dan target yang direncanakan diawal. Indikasinya, 1. Dalam proses pengusulan epropos, kementerian harus membuka 4 kali untuk mengakomodir kepentingan para aktor, 2. Banyak realokasi penerima bantuan pemerintah di lapangan. Ketiga, Perencanaan Pembangunan pada sektor Pertanian pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan input untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, salah satunya adalah modernisasi alat mesin pertanian/Alsintan dan bantuan input lainnya (X. Yu, Z. Leng and H. Zhang. 2012; IM Fahmid et al, 2021). Namun, niat dari perencana yang dituangkan dalam perencanaan tidak serta merta dapat diimplementasikan di tingkat lapangan (Li, 2011). Pada kasus di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat misalnya, Kementerian Pertanian sejak tahun 2015-2020 telah mengalokasikan bantuan Alsintan sebanyak 4.310 unit (Kementan, 2021), terdiri dari alat pengolah tanah (*transplanter*) hingga alat panen (*combine harvester*). Namun demikian, banyak Alsintan yang hingga kini tidak dimanfaatkan oleh petani. Keempat, dari semua proses tersebut, pola interaksi dalam proses penyusunan perencanaan menurut friedmann (1987) harusnya pola top-down&bottom up, namun demikian, yang terjadi di lapangan sangat beragam, pola interaksi yang melibatkan multi aktor menghambat proses penyusunan perencanaan nasional dan daerah yang konsisten.

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan dari pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi rencana dan implementasi antara nasional dengan daerah pada sektor pertanian?
2. Bagaimana dinamika relasi aktor dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian?
3. Bagaimana pengelolaan bantuan pemerintah (*delivery dan receiving mechanism*) dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsistensi rencana dan implementasi antara nasional dengan daerah pada sektor pertanian.
2. Menganalisis peran, kepentingan, dan kuasa aktor dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian.
3. Menganalisis pengelolaan bantuan pemerintah (*delivery dan receiving mechanism*) dalam keterkaitan perencanaan nasional dan daerah pada sektor pertanian.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai interkoneksi perencanaan nasional dan daerah, dinamika relasi aktornya, proses pemberian sumberdaya (*delivery resources*), penerimaan (*receiving mechanism*) dalam keterkaitan perencanaan pembangunan pada sektor pertanian.